



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MATARAM

FAKULTAS HUKUM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram 83125

Telepon (0370), 633035, Fax. 626954

Laman <http://www.fh.unram.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 9065 /UN18.F3/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI PROPOSAL DISERTASI
MAHASISWA SEMESTER GASAL PADA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan ujian kualifikasi proposal disertasi mahasiswa semester gasal pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, perlu mengangkat pengujinya pada program studi dimaksud;

b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Nomor 143/UN18.D1/HK/2019 tanggal 21 November 2019 hal Mohon Diterbitkan SK tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut maka perlu menerbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram tentang Pengangkatan Dosen Penguji Ujian Kualifikasi Proposal Disertasi Mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun Akademik 2019/2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembar Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara RI Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4496);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

8. Keputusan Dirjen Dikti Mendikbud Nomor 30/E/O/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Magister/Doktor Ilmu Hukum Universitas Mataram;

9. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Universitas Mataram;
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Akademik Universitas Mataram.
11. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 5105/H18.H/HK.01.12/2002 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mataram untuk Membuat dan Menandatangani Surat Keputusan;
12. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 3237/UN18/KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mataram Periode Tahun 2018-2022;
13. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 3283/UN18/HK/2018 tentang Pengelolaan Program Studi Magister Dan Doktor Di Lingkungan Universitas Mataram Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA SEMESTER GASAL PADA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Mengangkat saudara-saudara sebagai Dosen Penguji Ujian Kualifikasi Proposal Disertasi Mahasiswa Semester Gasal pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun Akademik 2019/2020, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Biaya yang Timbul atas diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA BLU Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 30 Desember 2019

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS MATARAM
 NOMOR 9065 /UN18.F3/HK/2019
 TANGGAL 30 DESEMBER 2019
 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI
 UJIAN KUALIFIKASI PROPOSAL DISERTASI
 MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI DOKTOR
 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
 MATARAM TAHUN AKADEMIK 2019/2020

No	Nama Mahasiswa	NIM	Judul	Penguji
1	Hasan Basri		Rekonstruksi Prinsip Layak dan Adil Dalam Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH., SU. Prof. Dr. Amiruddin, SH., M.Hum. Dr. H. M. Arba, SH., M.Hum.
2	Khairul Natanagara		Kewenangan Absolut Pengujian Peraturan Perundang - Undangan Hukum Nasional	Prof. Dr. H. Gatot DH Wibowo, SH., M.Hum. Dr. RR. Cahyowati., SH., MH M. Hayyanul Haq, SH., LLM., Ph.D.
3	Syamsudin Baharuddin		Rekonstruksi Lembaga Pra Penuntutan Dalam Mewujudkan Fungsi Cheks And Balance Dalam Penggunaan Kewenangan Antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum	Amiruddin, SH., M.Hum. Dr. H. Lalu Parman.,SH., M.Hum Dr. H. Kaharuddin, SH., MH.
4	RR. Rita Hidayati		Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Studi Di Nusa Tenggara Barat)	Prof. Dr. H. Salim HS., SH., M.S. Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH., SU. Dr. H. Hirsanuddin, SH., M.Hum.
5	Lalu Mujahid Imaduddin		Konsep Al-Maqosid Al-Syari'ah (Tujuan Hukum Islam) Dalam RUU KUHP Pasal Zina: Upaya Pembangunan Hukum Nasional Yang Adil dan Beradab	Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH, MH Amiruddin, SH., M.Hum. Dr. H. Lalu Parman.,SH., M.Hum
6	Novi Arianti		Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Bagi Kesejahteraan Masyarakat (Studi Terhadap Hak Atas Tanah Yang Tidak Memiliki Akses Menuju Jalan Umum)	Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH., SU. Prof. Dr. H. Salim HS., SH., M.S. Dr. H. Arba, SH., M.Hum.
7	TM. Luthfi Yazid		Perlindungan Hak Fundamental Warga Negara Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Ibadahumroh (Studi Kasus Kegagalan Umroh Kolektif First Travel dan Abu Tour	Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, SH., M.Hum. Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH, MH M. Hayyanul Haq, SH., LLM., Ph.D.
8	Adhar Hakim		Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2019 Dalam Membangun	Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, SH., M.Hum.

		Partisipasi Publik Di Indonesia	Prof. Dr. H. Gatot DH Wibowo, SH., M.Hum. Dr. H. Kaharuddin, SH., MH
9	Najamudin	Konsep Radikalisme Dalam UU Ormas dan UU Pesantren Implikasinya Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)	Prof. Dr. H. L. Husni, SH., M.Hum. Prof. Dr. H. Muhammad Natsir., SH., M.Hum. Dr. Any Suryani Hamzah, SH., MH.
10	Mohan Roliskana	Rekkostruksi Tugas dan Wewenang Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, SH., M.Hum. Dr. RR. Cahyowati., SH., MH. Dr. H. M. Ilwan., SH., MH.
11	Yuliatin	Implementasi Pasal 31(3) UUD 1945 Dalam Kebijakan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal	Prof. Dr. H. L. Husni, SH., M.Hum. Prof. Dr. H. Muhammad Natsir., SH., M.Hum. Dr. H. Muhammad Sood, SH., MH.
12	Pahittiartik	Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah	Prof. Dr. H. Gatot DH Wibowo, SH., M.Hum. Dr. H. M. Ilwan., SH., MH. Dr. Minollah., SH., MH.
13	Sri Karyati	Penguatan Fungsi Legislasi DPR RI Setelah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Dihubungkan Dengan Pembaharuan Hukum Nasional	Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, SH., M.Hum. Dr. H. Kaharuddin, SH., MH. Dr. RR. Cahyowati., SH., MH.
14	Saharjo	Pola Penyelesaian Senketa Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika	Prof. Dr. H. Salim HS., SH., M.S. Dr. H. Hirsanuddin, SH., M.Hum. Dr. H. Arba, SH., M.Hum.

Ditetapkan di Mataram
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM,

